

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN WONOGIRI**



Disusun oleh:

YULIA ANGGRAINI

B 200 100 041

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

ABSTRACT

Purpose of the research is to analysis implementation of regulation of Organization and Management of Regional Finance of Wonogiri Regency. Result of the research is expected to be able to enhance knowledge insights related to implementation of Wonogiri Local Government in organizing and managing regional finance.

Hipotesis testing of the research uses a moderating regression analysis of t-test, F-test, and determination Coefficient (R^2). Population of the research is all regional governmental officers of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) or Local Apparatus Task Force. While sample of the research is Chief of SKPD, secretary of SKPD, and Division Leaders in charges of local, services, and technical institution of Local Government of Wonogiri Regency amounting to 120 individuals.

Based on results of the research, it was known that effect of local government apparatus' attitude on Implementation of Local Government in Organizing and Managing Local Finance obtained $p = 0.000 < 0.05$; it means that attitude of local government apparatus improves the Implementation of Local Government. Effect of confusion of the local government apparatus on Implementation of Local Government in organizing and managing local finance obtained value of $p = 0.039 < 0.05$; it means that confusion of the local government apparatus reduces Implementation of Local Government. Effect of easiness of using local regulation on Implementation of Local Government obtained value of $p = 0.036 < 0.05$; it means that the easiness of using local regulation enhances Implementation of Local Government. Effect of the use of regulation of Implementation of Local Government in organizing and managing local finance acquired value of $p = 0.000 < 0.05$; it means that the use of regulation has positive effect in enhancing Implementation of Local Government. The factor affecting Implementation of Local Government dominantly in organizing and managing local finance of Wonogiri Regency is the use.

Key words: *Implementation, organization and management of local finance, attitude of governmental officer, easiness of regulation, the use of regulation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang bertugas di sekretaris daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 120 orang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh sikap aparat pemerintah terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$; artinya sikap aparat pemerintah berpengaruh meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai $p = 0,039 < 0,05$; artinya kebingungan aparat pemerintah berpengaruh menurunkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai $p = 0,036 < 0,05$; artinya kemudahan penggunaan aturan berpengaruh meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kegunaan aturan terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$; artinya kegunaan aturan berpengaruh positif meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri adalah kegunaan.

Kata kunci: *Implementasi, Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sikap Aparat Pemerintah, Kemudahan Aturan, Kegunaan Aturan.*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I -- Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax. 715448 Surakarta 57192

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi:

Nama : Dr. Zulfikar, SE, M.Si.

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi dari mahasiswa:

Nama : YULIA ANGGRAINI

NIM : B200100041

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, November 2014

Pembimbing

(Dr. Zulfikar, SE, M.Si)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang terjadi secara bersamaan, baik sosial, dan politik di berbagai daerah. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, menurunnya pelayanan prasarana dan sarana umum akibat mengecilnya penerimaan pemerintah daerah termasuk PAD, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menurunnya ketentraman masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Mansyur, 2004). Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut diantaranya adalah dengan menganalisa sistem keuangan daerah termasuk didalamnya sistem penganggarannya (*budgertary*)

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengelolaan administrasi keuangan daerah yang cukup baik. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri semenjak tahun anggaran 2007 telah menerapkan anggaran dengan pendekatan kinerja. Di dalam proses penyusunan anggarannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri secara operasional mendasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Proses penyusunan anggaran merupakan suatu proses krusial, dimana dalam proses tersebut menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk satu tahun yang akan datang. Karena proses penyusunan anggaran merupakan proses yang krusial, maka proses tersebut seharusnya selalu dilakukan evaluasi sehingga kedepannya akan semakin baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Wonogiri bahwa anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju.

Pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran

daerah dituangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Wonogiri”.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
4. Untuk menganalisis pengaruh kegunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan bagi suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran merupakan dokumen kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat penting dan merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa anggaran berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (1993) adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Anthony dan Young (2003) anggaran merupakan suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang di susun untuk periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran secara jelas mengekspresikan apa yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan dan menyatakan juga otoritas penggunaan sumber daya keuangan yang diperlukan.

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan juga dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dijelaskan pula bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu meliputi:

- 1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Struktur APBD mengalami beberapa kali perubahan. Pada era prareformasi berdasarkan UU No. 6/1975 susunan APBD awalnya terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu sendiri terbagi menjadi pendapatan dan belanja rutin, demikian pula pada anggaran pembangunan terdiri dari pendapatan dan belanja pembangunan. Pada tahun 1984-1988 terjadi perubahan susunan dan bentuk APBD menjadi pendapatan dan belanja. Pendapatan di sini terbagi menjadi pendapatan daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan (UKP). Belanja dirinci menjadi belanja rutin (diklasifikasikan ke dalam 10 bagian) dan belanja pembangunan (diklasifikasikan menjadi 21 Sektor). Pada tahun 1998 sebelum reformasi juga terjadi perubahan pada pendapatan daerah, yaitu pada bentuk sebelumnya pendapatan dari daerah diklasifikasikan menjadi empat (sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak, serta sumbangan dan bantuan) berubah pada bentuk yang baru, dimana bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan dan bantuan dimasukkan ke dalam satu bagian, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi (Yuwono et al, 2008)

Pada era reformasi struktur APBD pun mengalami perubahan-perubahan, yaitu struktur APBD yang didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 kemudian berubah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa perubahan yang signifikan antara susunan laporan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006 dengan Kepmendagri 29/2002 dapat dilihat pada gambar 2.1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan juga dikeluarkan struktur APBD berdasarkan PP No 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sikap

Sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai perasaan umum aparat pemda untuk lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam penyusunan APBD. Definisi ini diturunkan dari definisi yang telah dirumuskan peneliti terdahulu seperti, Allport, 1967; Fishbein dan Ajzen, 1975; dan Triandis, 1980. Dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara positif akan meningkatkan aparat pemda tersebut.

Jika seseorang dalam hal ini aparat pemda menyimpulkan bahwa pada tingkat tertentu, manfaat potensial penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka (penyusunan APBD) melebihi *cost* yang mereka keluarkan, maka mereka akan secara positif bersikap terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Dampak atau konsekuensi lebih lanjut dari ini adalah meningkatnya kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut. Dengan sikap yang positif, maka kinerja pekerjaan aparat pemda juga menjadi semakin positif atau meningkat. Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; dan Bhagat, 1983.

Kebingungan

Kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan Otda yang adalah tidak proporsional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis kebingungan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam, ketidak proporsionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (Spielberg, 1966; Howard, 1986). Dari situasi seperti ini maka dapat diprediksi bahwa semakin meningkat kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinannya. Intensitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon rangsangan khusus (dalam penelitian ini adalah keberadaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membujuk atau mendorong bahwa orang tersebut akan tetap atau tidak menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar argumentasi atau definisi ini maka dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD.

Kemudahan Penggunaan

Tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga semakin tinggi. Argumentasi yang mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku adalah kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri (*self-efficacy*). Sesuai dengan penelitian Bandura (1982), kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri (*self-efficacy*) adalah judgment atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat dengan mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang dibutuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah perkiraan aparat pemda dalam mengeksekusi atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudahan tentang penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD.

Kegunaan Aturan

Penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Mengikuti penelitian Hill et al., 1987; Robey, 1979; dan Vroom, 1964, maka dalam konteks aparat pemda dan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Untuk memperkirakan apakah aparat pemda akan menggunakan atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, juga tergantung pada apakah aparat pemda tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau tidak. Jika aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemda tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada SKPD Kabupaten Wonogiri terdapat 34 SKPD yang keseluruhan pegawainya berjumlah ± 629 orang. Teknik pengambilan *sample* yang digunakan adalah *purposive sample*. *Purposive sample* dalam penelitian ini adalah kepala

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang bertugas di sekretaris daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 120 orang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung kepada objek penelitian dengan mekanisme kuisisioner model tertutup yang memuat daftar pertanyaan yang terkelompok menurut dimensi-dimensi pengukuran variabel.

Metode Analisis Data berupa: 1) Pengujian Instrumen, yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, 2) Pengujian Asumsi Klasik, yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dan 3) Pengujian Hipotesis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan langkah selanjutnya setelah hasil regresi adalah uji ketepatan parameter penduga (uji t) dan uji ketepatan model (Uji F dan R^2).

HASIL PENELITIAN

Sebaran Data Penelitian

No	Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	120	100%
2.	Kuesioner yang kembali	112	93,33%
3.	Kuesioner yang rusak	(5)	4,16%
Jumlah Kuesioner yang diolah		107	89,16%

Sumber: data primer diolah, 2014

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang berjumlah 120 lembar diketahui bahwa 93,33% atau 112 lembar kuesioner kembali. Namun diantaranya jumlah kuesioner yang kembali terdapat 4,16% atau 5 lembar kuesioner yang rusak atau jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti tidak lengkap, sehingga tersisa 89,16% atau 107 lembar kuesioner yang bisa diolah.

Distribusi Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin			
1.	Laki-Laki	67	62,6%
2.	Perempuan	40	37,4%
	Jumlah	107	100%
Jabatan			
1.	Kepala SKPD	32	29,9%
2.	Sekertaris SKPD	34	31,8%
3.	Kepala Bagian	41	38,3%
	Jumlah	107	100%
Lama Menjabat			
1.	< 3 Tahun	8	7,5%
2.	3 – 6 Tahun	9	8,4%
3.	6 – 9 Tahun	68	63,6%
4.	> 9 Tahun	22	20,6%
	Jumlah	107	100%
Tingkat Pendidikan			
1.	Diploma	19	17,8%
2.	S1	51	47,7%
3.	S2	37	34,6%
	Jumlah	107	100%

Sumber: Data primer diolah, 2014

1. Pengaruh sikap aparat terhadap Implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh sikap terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,651$ dengan $p = 0,000 < 0,05$; sehingga **H₁ diterima**, artinya sikap berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai perasaan umum aparat pemda untuk lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam penyusunan APBD.

2. Pengaruh kebingungan aparat terhadap Implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri

Hasil perhitungan untuk pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,096$ dengan $p = 0,039 < 0,05$; sehingga **H₂ diterima**, artinya kebingungan aparat pemerintah berpengaruh negatif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan Otda yang tidak proporsional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistis dan keprihatinannya. Intensitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon rangsangan khusus (dalam penelitian ini adalah keberadaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah).

3. Pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap Implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri

Hasil perhitungan untuk pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,127$ dengan $p = 0,036 < 0,05$; sehingga **H₃ diterima**, artinya kemudahan penggunaan aturan berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Tingkat kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan Keuangan Daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga semakin tinggi. Argumentasi yang

mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku adalah kemandirian atau kemujaraban diri sendiri (*self-efficacy*).

4. Pengaruh kegunaan aturan terhadap Implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri

Hasil perhitungan untuk pengaruh kegunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 5,812$ dengan $p = 0,000 < 0,05$; sehingga **H₄ diterima**, artinya kegunaan aturan berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Jika aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemda tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh sikap terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,651$ dengan $p = 0,000 < 0,05$; sehingga **H₁ diterima**, artinya sikap berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,096$ dengan $p = 0,039 < 0,05$;

sehingga **H₂ diterima**, artinya kebingan aparat pemerintah berpengaruh negatif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

3. Pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,127$ dengan $p = 0,036 < 0,05$; sehingga **H₃ diterima**, artinya kemudahaan penggunaan aturan berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
4. Pengaruh kegunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh nilai $t_{hitung} = 5,812$ dengan $p = 0,000 < 0,05$; sehingga **H₄ diterima**, artinya kegunaan aturan berpengaruh positif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

Saran

1. Penelitian ini hanya mencakup evaluasi terhaap proses penyusunan anggaran saja. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga dari hasil evaluasi penyusunan, pelaksanan dan pertanggungjawaban, akan didapat gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode survey untuk membuktikan keefektifan impelementasi dan melengkapi hasil temuan dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan di daerah lain dengan jangkauan pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G.W., 1967, *The historical background of modern social psychology*, in: C. Murchison, ed., *Handbook of sociology* (Clak University Press, Wocester) 798-844.
- Andrianto, Muhammad. 2011. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, dan S. Mark Young. 2003, *Management Accounting*. Edisi ke-2, New Jersey: Prentice Hall, Inc
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Bandura, A., 1982, *Self-efficacy mechanism in human agency*, American Psychologist 37, 122-147.
- Bhagat, R.S, 1983, *Effects of stressful life events on individual performance effectiveness and work adjustment processes within organizational settings: A research model*, Academy of Management Review 8, 660-671.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Fishbein, M. and I. Ajzen, 1975, *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and reserch* (Addison-Wesley, Reading, MA).
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginzberg, M.J., 1981, *Early diagnosis og MIS implementation failure: Promising result and unanswered questions*, Management Science 27, 459-478.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Haryani., et al. 2010. Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Hansen, D.R dan Maryane M. Mowen, 2005. *Cost Management, Accounting and Control*, Ohio: South Western College Publishing.
- Howard, G.S., 1986, *Computer anxiety and the use of microcomputers in management* (UMI Research Press, Ann Arbor, MI).

- Hill, T., N.D. Smith, and M.F. Mann, 1987. Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers, *Journal of Applied Psychology* 72. 307-313.
- Isaac, Stephen, dan William B., Michael. 2002. *Hand Book in Research and Evaluation*, 2nd Edition. San Diego, California: Edit Publishers
- Ives, B.I., M.H. Olson, and J.J. Baroudi, 1983, *The measurement of user satisfaction*, *Communcations of the ACM* 26, 785-793.
- Lucas, H.C., 1975, *Perfomance and the use of an information system*. *Management Science* 21, 908-919.
- Mansyur, Cholil, 2004. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Biaya*. Edisi ke-5. Yogyakarta: BP-STIE YKPN.
- Nevell, P., 1991, *an investigation of the effects of computer spreadsheets on cognitive decision behavior*, PhD thesis (The University of Queensland).
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robey, D., 1979, User Attitudes and management information system use. *Academy of Management Journal* 22, 527-538.
- Schewe, C.D., 1976, The management of the information system user. An exploratory analysis, *Academy of Management Journal* 19, 577-590.
- Speilberger, C.D., 1966, *Anxiety and behavior* (Academic Press, New York).
- Triandis, H.C., 1980 *Values, attitudes, and interpersonal behavior*, in: *Nebraska symposium on mitivation, 1979: Beliefs, attitudes, and values* (University of Nebraska, Lincoln, NE) 195-259.
- Vroom, V.H., 1964, *Work and motivation* (John Wiley and Sons, New York)
- Yuwono, Sony., et al. 2008. *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya: Banyumedia Publishing.